

BAB I

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN merupakan persyaratan bagi setiap pelaksana Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan pencapaian tujuan dan sasaran Instansi, untuk itu diperlukan adanya pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang akuntabel dan transparan, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pasal 2 ayat (1) diamanatkan bahwa Penyelenggaraan SAKIP dilakukan untuk menyusun Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dan pada pasal 2 ayat (2) ditegaskan bahwa Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Hal ini merupakan langkah awal untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, terpercaya serta berorientasi pada hasil. Sehubungan dengan itu diperlukan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur yang diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan berbasis kinerja sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik, berdaya guna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari KKN.

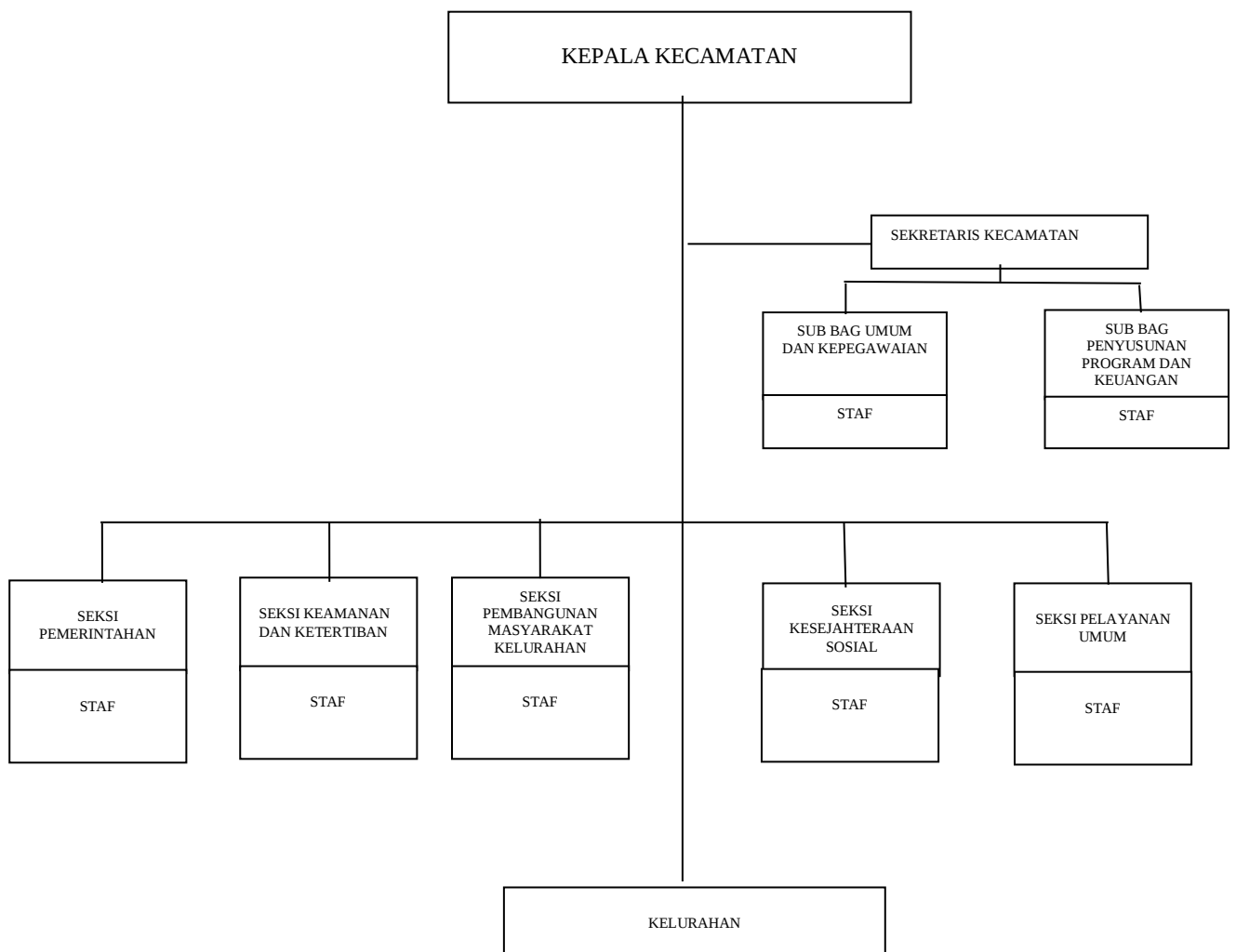
Sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Kinerja yang juga merupakan instrument SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah Kecamatan Sungai Serut untuk mempertanggungjawabkan hasil kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

1.1. Struktur Organisasi Kecamatan Sungai Serut

Kantor Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor : 28 Tahun 2003 Tanggal 15 Desember 2003 dengan pusat pemerintahan di Kelurahan Surabaya merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut :

Bagan 1. Struktur Organisasi Kecamatan Sungai Serut



1.2. Fungsi dan Tugas Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu

Berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 45).

Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan

Tugas Kecamatan

Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :

- Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum Sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat Sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan terkoordinasi dengan baik.
- Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Sesuai ketentuan yang berlaku agar terwujud situasi yang kondusif.
- Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik
- Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan terkoordinasi dengan baik.
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat daerah di tingkat kecamatan Sesuai ketentuan yang berlaku agar kegiatan berjalan dengan lancar.

- Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintahan Daerah Kota yang ada di kecamatan Sesuai ketentuan yang berlaku agar urusan dapat berjalan dengan baik.
- Melaksanakan laporan hasil pelaksanaan tugas Camat Sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana di atas Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota.

Fungsi Kecamatan

Dalam melaksanakan tugasnya , Camat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Penyusunan Program di Kecamatan.
- Pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan social dan pelayanan umum
- Pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kota di Wilayah Kecamatan
- Pelayanan informasi mengenai wilayah kecamatan yang dibutuhkan dalam perumusan kebijakan bagi Walikota
- Pelaksanaan administrasi kecamatan
- Pengkoordinasian kegiatan-kegiatan pelayanan lintas kelurahan
- Pengoordinasian kegiatan – kegiatan lintas sektor
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di kecamatan

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya

Susunan Organisasi Pemerintahan Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 58 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bengkulu, Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan terdiri dari :

- a. Kepala Kecamatan
- b. Sekretariat
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Pembangunan Masyarakat Kelurahan
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial
- g. Seksi Pelayanan Umum

Uraian Tugas dan Fungsi Kelurahan

Tugas Kelurahan

Kepala kelurahan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:

- Melaksanakan kegiatan pemerintahan di kelurahan
- Melakukan pemberdayaan masyarakat
- Melaksanakan pelayanan masyarakat
- Memelihara ketentraman dan ketertiban umum
- Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat
- Melaksanakan tugas lain Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Kelurahan

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tugas tersebut diatas, Kepala Kelurahan mempunyai fungsi :

- Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan Kota di wilayah kelurahan
- Penyiapan informasi mengenai wilayah kelurahan yang dibutuhkan dalam perumusan kebijakan bagi Walikota.

Susunan Organisasi Pemerintahan Kelurahan

Susunan Organisasi Pemerintahan Kelurahan sebagai berikut :

- a. Kepala Kelurahan
- b. Sekretaris kelurahan
- c. Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum
- d. Seksi Pembangunan
- e. Seksi Pelayanan Umum

Dalam melaksanakan tugasnya Lurah, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi atas segala kegiatan pemerintahan di wilayah kerjanya.

Setiap pimpinan satuan kerja organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kelurahan wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Setiap pimpinan satuan kerja organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kelurahan bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan

bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Setiap pimpinan satuan kerja organisasi dalam lingkungan Pemerintahan Kelurahan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala maupun sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

1.3. Isu Strategis

Kecamatan Sungai Serut merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota dan mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kota bidang Pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan Pelayanan Kepada Masyarakat dengan berpedoman kepada Standar Pelayanan yang telah ditetapkan agar dapat memberikan pelayanan administrasi umum secara maksimal. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kecamatan dibantu dengan kelurahan yang ada di wilayah kecamatan yang secara bersama-sama melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan merencanakan pembangunan dan pengembangan di masyarakat.

Pelayanan publik yang berkualitas atau yang biasa disebut dengan pelayanan prima merupakan pelayanan terbaik yang memenuhi standar kualitas pelayanan. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014, komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi Persyaratan, prosedur, jangka waktu pelayanan, biaya/tarif, produk pelayanan, dan penanganan pengaduan. Jika suatu Instansi pemerintah dan lembaga lainnya mampu menerapkan standar kualitas tersebut maka sudah dapat dikatakan bahwa Instansi pemerintah dan lembaga tersebut telah memberikan kualitas pelayanan yang baik.

Pelayanan administrasi umum di kecamatan merupakan segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga negara atau penduduk atas pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan kecamatan yang terkait dengan kepentingan administrasi umum. Contoh pelayanan publik dalam bentuk pelayanan administrasi yaitu perekaman KTP (Kartu Tanda Penduduk) Elektronik dan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) dan lain sebagainya.

Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat mengenai diskriminasi pelayanan. Sebagai contoh adanya masyarakat yang dipersulit ketika mengurus KTP (Kartu Tanda Penduduk) di instansi pemerintah seperti dikenakan biaya ekstra untuk mendapatkan pelayanan yang lebih cepat. Selain itu keluhan lain yang diungkapkan pengguna layanan yaitu adanya ketidakpastian waktu sehingga mengakibatkan rendahnya kualitas pelayanan. Ketidakpastian waktu dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap Instansi pemerintah tersebut. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat, maka Kecamatan Sungai Serut perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan.

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan dimana masyarakat berniatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Di sisi lain, salah satu kata kunci pada saat ini yang sering didengungkan oleh semua lapisan masyarakat adalah kata peningkatan sumberdaya manusia. Kata tersebut mempunyai makna lebih spesifik lagi menyangkut bagaimana mengangkat kondisi masyarakat yang ada menjadi lebih baik dimasa mendatang.

Masyarakat dalam sebuah pemerintahan sangat besar perannya, keikutsertaan atau keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemerintah terkait kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan hal penentu berhasil atau tidaknya kebijakan tersebut. Pengambilan keputusan dalam sebuah kebijakan diperlukan peran serta masyarakatnya agar pemenuhan hak dari masyarakat bisa terpenuhi. Aktifnya masyarakat akan mempermudah tercapainya target pemerintah dimana target tersebut juga akan dirasakan oleh masyarakat manfaatnya. Selain masyarakat ada juga hal yang perlu diberdayakan, yakni aspek kelembagaan masyarakat. Lembaga merupakan wadah masyarakat untuk bisa ikut serta dalam sebuah kegiatan. Memanfaatkan kelembagaan yang ada atau menciptakan lembaga masyarakat merupakan langkah yang tepat mempermudahnya proses tercapainya tujuan dari kebijakan pemberdayaan masyarakat. Semua itu tetap yang menyelenggarakan adalah pihak pemerintah dan masyarakat sebagai objek yang ditujukan harus diarahkan dan diawasi agar bisa selalu dalam koridornya. Pemerintah hanya perlu mengoptimalkan daya yang ada di masyarakat dengan memfasilitasi masyarakat melalui pelayanan umum yang disediakan.

Dari uraian diatas secara umum dapat dapat disimpulkan isu strategis yang ada di Kecamatan Sungai Serut adalah : “ Sulitnya akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan dan layanan pemerintahan serta masih rendahnya kapasitas SDM di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan”.

1.4. Keadaan Pegawai

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kecamatan dilaksanakan dengan sumber daya pegawai (ASN) yang ada di kecamatan.

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai Tahun 2025 Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional

No	Jabatan	Jumlah (org)
1	Eselon II	-
2	Eselon III	2
3	Eselon IV	36
4	Fungsional Umum dan Fungsional tertentu	15
5	PPPK	15
6	PPPK Paruh Waktu	9
	JUMLAH	77

Jumlah pegawai yang ada di kecamatan dan kelurahan sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) pegawai, berdasarkan jabatan struktural dan fungsional terdapat sebanyak 2 (dua) orang pegawai menduduki jabatan eselon III, sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang menduduki jabatan eselon IV, sebanyak 15 (lima belas) pegawai yang menduduki jabatan fungsional umum, sebanyak 15 (lima belas) orang PPPK dan 9 (sembilan) orang PPPK Paruh Waktu.

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Kecamatan Sungai Serut 2025 Berdasarkan
Golongan

No	Golongan	Jumlah (orang)
1	Golongan I	-
2	Golongan II	-
3	Golongan III	51
4	Golongan IV	2
	JUMLAH	53

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 53 (lima puluh tiga) PNS yang ada terdiri dari Pegawai golongan I sebanyak 0 pegawai, pegawai golongan II sebanyak 0 pegawai, pegawai golongan III sebanyak 51 (lima puluh satu) pegawai dan pegawai golongan IV sebanyak 2 (dua) pegawai.

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Kecamatan Sungai Serut Tahun 2024 berdasarkan
kualifikasi Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Strata 3 (S3)	-
2	Strata 2 (S2)	1
3	Strata 1 (S1)	50
4	Diploma III (D-III)	1
5	Diploma II (D-II)	-
6	SLTA	1
7	SLTP	-
8	SD	-
	JUMLAH	53

Dari tabel 1.3 di atas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan pegawai yang ada di Kecamatan Sungai Serut dari 53 (lima puluh tiga) PNS yang ada dengan jenis jenjang pendidikan yaitu pendidikan Strata 2 (S2) sebanyak 1 (satu) orang, Strata I (S1) sebanyak 50 (lima puluh) pegawai, pendidikan Diploma III sebanyak 1 (satu) orang dan tingkat pendidikan SLTA sebanyak 1 (satu) pegawai.

Tabel 1.4 Jumlah Pegawai Kecamatan Sungai Serut berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)
1	Laki – Laki	22
2	Perempuan	31
	JUMLAH	53

Dari Tabel 1.4 dapat dilihat bahwa jumlah pegawai menurut jenis kelamin terdiri dari 22 (dua puluh dua) orang pegawai laki-laki dan 31 (tiga puluh satu) orang pegawai perempuan.

1.5. Keadaan Sarana dan Prasarana di Kecamatan Sungai Serut

Sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan di Kecamatan Sungai Serut dapat dilihat pada tabel di bawah, secara umum sarana yang ada dalam kondisi baik.

Tabel 1.5 Jenis Sarana dan Prasarana Di Kecamatan Sungai Serut

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah (unit)	Kondisi
1	Sepeda Motor	12 unit	Baik
2	Ruang rapat	1 ruangan	Baik
3	PC Unit	10 unit	Baik
4	Laptop	21 unit	Baik
5	Mini Bus	1 unit	Baik
6	Mobil Ambulance	2 unit	Baik
7	Ruang Kerja	8 gedung	Baik

Alat transportasi yang dimiliki kecamatan terdiri dari kendaraan dinas roda dua sebanyak 12 (dua belas) unit, dan kendaraan dinas roda empat sebanyak 3 (tiga) unit terdiri dari 2 unit ambulance kecamatan dan 1 unit minibus. Fasilitas lain yang terdapat di kecamatan terdiri dari Ruang kerja pelayanan terdiri dari 8 gedung kantor kecamatan dan kelurahan, 1 ruang rapat, 10 unit komputer dan 21 unit laptop.

1.6. Keuangan

Anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Sungai Serut pada tahun 2025 berasal dari APBD Kota Bengkulu. Pada Tahun Anggaran 2025 Kecamatan Sungai Serut mendapatkan alokasi anggaran pada awal tahun sesuai dengan DPA Nomor DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.38.0000/002/2025 Tanggal 16 Januari 2025 sebesar Rp. 11.150.718.301,- dengan alokasi belanja operasi sebesar Rp. 10.018.704.601,- dan belanja modal sebesar Rp. 1.132.013.700,- yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung. Kemudian terdapat perubahan pada sesuai dengan DPA Perubahan Kecamatan Sungai Serut pada tanggal 14 November 2025 Nomor DPPA/A.3/7.01.0.00.0.00.38.0000/001/2025 dengan total anggaran berubah Rp. 11.372.742.788,- dengan jumlah anggaran belanja operasi sebesar Rp. 10.030.132.788,- (terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp. 6.891.266.011,- dan belanja barang dan jasa sebesar Rp. 3.136.866.777,-) dan belanja modal sebesar Rp. 1.342.610.000,- (yang terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin Rp. 342.610.000,- dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp. 1.000.000.000,-).

1.7. Sistematika LKjIP

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Kecamatan Sungai Serut Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek startegis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi ogranisasi Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2025.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Kecamatan Sungai Serut. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, dilengkapi dengan tabel (form 2);
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, dilengkapi dengan tabel (form 3);

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kecamatan Sungai Serut.
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
5. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini disajikan uraian realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV. PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja Kecamatan Sungai Serut.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin terjadi.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bengkulu Tahun 2025-2029 Kota Bengkulu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bengkulu Tahun 2025-2029 tanggal 28 Agustus 2025. Dalam dokumen RPJMD terlihat bahwa untuk mencapai tujuan Kepala Daerah yaitu meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, Perangkat Daerah Kecamatan Sungai Serut memiliki tujuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan dan meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa dengan sasaran meningkatnya pelayanan publik di Kecamatan. Kecamatan berperan penting dalam membangun dan mensinergikan kesatuan arah pandangan dan mekanisme gerak tujuan OPD menuju Visi utama penyelenggaraan pemerintahan Kota Bengkulu Yaitu “Kota Bengkulu Semakin Maju, Religius, Bahagia, dan Berkelanjutan”.

1. VISI

Visi adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai. Kota Bengkulu melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 2025-2029 sebagaimana tersebut dalam Dokumen Rencana Strategis mendukung Visi Kota Bengkulu yaitu : ” Kota Bengkulu Semakin Maju, Religius, Bahagia, dan Berkelanjutan”.

2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan yang merupakan penjabaran dari visi yang ditetapkan. Untuk mewujudkan visi Pembangunan Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2024-2026. Misi Kecamatan Sungai Serut sebagaimana tersebut dalam Rencana Strategis mendukung Misi Kota Bengkulu yaitu: “tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif”.

3. TUJUAN

Tujuan merupakan suatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahunan. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Sekretariat Daerah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Sungai Serut maka ditetapkan tujuan Kecamatan Sungai Serut adalah **Terwujudnya Pelayanan Publik di Kecamatan dan Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa.**

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD Kecamatan Sungai Serut yang dikaitkan dengan target kinerja dari rumusan awal Renstra Tahun 2025-2029 Strategi dan kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari Visi dan Misi yang diemban Kecamatan Sungai Serut Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Pelayanan Publik di Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Meningkatkan penataan administrasi bidang pemerintahan, sosial, pembangunan dan kemasyarakatan	Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Pemerintahan, Sosial, Pembangunan Dan Kemasyarakatan
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa			Peningkatan sarana prasarana pendukung
			Peningkatan Fasilitas kecamatan dalam setiap bentuk pelayanan publik
		Penempatan kapasitas tata kelola pemerintahan kelurahan	Peningkatan kapasitas aparatur kelurahan
		Meningkatkan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat kelurahan

1. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur, spesifik dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sasaran dalam Rencana Strategis OPD Kecamatan Sungai Serut Periode Tahun 2025-2029 adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan dengan indikator sasaran presentase pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang tepat waktu. Sasaran yang hendak dicapai oleh Kecamatan Sungai Serut dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun yaitu Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel tersebut:

Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sungai Serut

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Pelayanan Publik di Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan
2	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa		Indek Desa Membangun (IDM)
			Persentase Pelayanan di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan yang Tepat Waktu

2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra maka ditetapkanlah Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) PD Kecamatan Sungai Serut

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase Pelayanan di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan yang Tepat Waktu	persen	82
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Administrasi Umum, Sarana dan Prasarana Penunjang Perangkat Daerah yang dipenuhi	Persen	100
		Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan	Nilai	BB
3.	Melaksanakan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi dalam 1 Tahun	Jumlah	1 Inovasi

2.3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Pada tahun 2025 ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang memuat 5 (lima) program yang meliputi Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Umum. Uraian dari masing – masing program dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Sungai Serut Tahun 2025

RENCANA KINERJA TAHUNAN /RKT

INSTAN : KECAMATAN SUNGAI
SI : SERUT
: TA : 2025

N o	Sasaran	Indikator Sasaran	Tar get	Program	Indikator Program	Targ et Program	Kegiatan/Su b Kegiatan	Indikator Kegiatan/ Output	Targ et Output	Anggaran
1	Meningkatnya pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	Nilai Evaluasi LKjIP Kecamatan	74	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten / kota	Persentase Administrasi Perkantoran yang terpenuhi	100%				
							Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	tersedianya Dokumen (Renja / P - renja, RKA / DPA, Tepra, Monev, LKjIP / SAKIP, Neraca, CALK, Rekon Aset) yang tersusun	96%	
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Renja / P - renja, RKA / DPA, Tepra, Monev, LKjIP / SAKIP, Neraca, CALK, Rekon Aset) yang tersusun	12 laporan	10.379.600
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya penatausahaan keuangan dan barang	100 %	

								milik daerah		
							Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54org/bln	6.508.478.023
							Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dok	446.640.000
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksanaan ya Administrasi Kepegawaian	95%	
							Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	-
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksanaan ya Administrasi Umum	80%	
							Penyediaan Komponen instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	7.550.200
							Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 paket	7.500.000
							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	21.000.500
							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dok	2.197.600
							Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 paket	29.997.300
							Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		3.075.000

							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	53.068.000
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86%	
							Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3unit	37.194.700
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86%	
							Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 lap	1.998.200
							Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 lap	68.999.700
							Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 lap	10.070.000
							Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 lap	90.486.000
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86%	

							Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 unit	120.736.300
							Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	2 unit	28.626.500
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Kecamatan yang berkinerja prima	100 %				
							Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	86%	
							Koordinasi / sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 lap	9.029.000
							Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	jumlah dokumen Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	4 dok keg	13.401.500
								- Kegiatan Penunjang Adipura		
								- Kegiatan Pembinaan Administrasi Kependudukan		
								- Kegiatan Penyusunan Buku Profil		
								- Kegiatan Pembinaan Perangkat		

								Kelurahan		
								- Kegiatan Perayaan Hari Besar Daerah dan Nasional		
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	100 %				
							Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	86%	
							Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	50 Keluarga	25.004.400
							Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	50 Keluarga	14.062.800

				Program Koordinasi Kenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Cakupan Koordinasi Kenteraman dan Ketertiban Umum	100%				
							Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	86%	
							Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Nindonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Isntansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Nindonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Isntansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	12.533.100
							Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5 Laporan	238.891.203
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%				
							Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Prasarana dan Sarana Penunjang Perangkat Daerah Yang Dipenuhi	100 %	

							Fasilitasi, Kooridnasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Kooridnasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 Orang	10.075.300
							Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah laporan konflik yang ditangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	2 lap	10.000.000
							Pelaksanaan tugas forum komunikasi pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen pelaksanaan tugas forum pimpinan di Kecamatan	3 dok	10.450.000
							penyelenggaan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	85%	
							<i>peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan</i>	<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	<i>12 lap, 12 bln</i>	
								Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan pada Kelurahan Kampung Kelawi	12 lap, 12 bln	245.313.200

							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan pada Kelurahan Semarang	12 lap, 12 bln	230.419.600
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan pada Kelurahan Tanjung Agung	12 lap, 12 bln	170.665.175
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan pada Kelurahan Tanjung Jaya	12 lap, 12 bln	179.854.600
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan pada Kelurahan Surabaya	12 lap, 12 bln	418.402.600
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan pada Kelurahan Pasar Bengkulu	12 lap, 12 bln	205.142.100

							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan pada Kelurahan Sukamerindu	12 lap, 12 bln	320.476.100
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	100 %			
						kegiatan pemberdayaan kelurahan	jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dikoordinasikan	85%	
						<i>peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah pembangunan di kelurahan</i>	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan</i>	<i>1 keg, 1 lembaga</i>	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kampung Kelawi	1 keg, 1 lembaga	20.000.000
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Semarang	1 keg, 1 lembaga	20.000.000

							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tanjung Agung	1 keg, 1 lembaga	20.000.000
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tanjung Jaya	1 keg, 1 lembaga	20.000.000
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Surabaya	1 keg, 1 lembaga	20.000.000
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pasar Bengkulu	1 keg, 1 lembaga	20.000.000
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sukamerindu	1 keg, 1 lembaga	20.000.000

							Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan	1 keg, 1 lembaga	
								Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan Kampung Kelawi		200.000.000
								Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan Semarang		200.000.000
								Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan Tanjung Agung		200.000.000
								Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan Tanjung Jaya		200.000.000

								Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembanguna n di kelurahan Surabaya		200.000.000
								Jumlah Lembaga Kemasyarakan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembanguna n di Kelurahan Pasar Bengkulu		200.000.000
								Jumlah Lembaga Kemasyarakan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembanguna n di kelurahan Sukamerindu		200.000.000
							Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dann Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dann Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	50 Keluarga	

							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing di Kelurahan Kampung Kelawi		7.000.000
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing di Kelurahan Semarang		7.000.000
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing di Kelurahan Tanjung Agung		7.000.000

								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing di Kelurahan Tanjung Jaya		7.000.000
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing di Kelurahan Surabaya		7.000.000
								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing di Kelurahan Pasar Bengkulu		7.000.000

								Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dann Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing di Kelurahan Suka Merindu		7.000.000
										11.150.718. 301

BENGKULU , 2025
Kepala Kecamatan Sungai Serut

ABRIADI, SH
Pembina Tk. I / IV b
NIP. 196810051997031009

2.4. Perjanjian Kinerja (PK)

Untuk mencapai Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kecamatan Sungai Serut dan didasarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2025 maka disusunlah perjanjian kinerja tahun 2025. Perjanjian Kinerja Kecamatan Sungai Serut disusun berdasarkan Program dan Kegiatan yang ada dalam DPA Kecamatan Sungai Serut Nomor: DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.38.0000/002/2025 Tanggal 6 Januari 2025. Dan telah disesuaikan perubahan anggaran sesuai kebutuhan berdasarkan DPA Perubahan pada tanggal 14 November 2025 Nomor : DPPA/A.3/7.01.0.00.0.00.38.0000/001/2025.

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 SKPD Kecamatan Sungai Serut

No.	Uraian Perjanjian Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase Pelayanan di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan yang Tepat Waktu	Persen	82
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Persentase Administrasi Umum, Prasarana dan Sarana Penunjang Perangkat Daerah yang dipenuhi	Persen	100
		Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan	Nilai	BB
3.	Melaksanakan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi dalam 1 Tahun	Jumlah	1 Inovasi

Indikator kinerja keberhasilan Perangkat Daerah Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu tahun 2025 dapat dilihat pada di atas, dijabarkan adalah sebagai berikut:

Untuk Meningkatnya pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan indikator kinerja yaitu :

1. Persentase Pelayanan di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan yang tepat waktu dengan target 82%
2. Nilai SAKIP dengan target nilai BB

Adapun Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.6 Program dan Kegiatan Tahun 2025

Program	Anggaran
1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1.792.703.875
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1.628.067.200
3. Program Koordiansi Ketentraman dan Ketertiban Umum	251.424.303
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Umum	30.525.300
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.447.997.623
JUMLAH	11.150.718.301

Dari tabel 2.6 di atas dapat dilihat jumlah Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp. 11.150.718.301,- (Sebelas Milyar Seratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Tiga Ratus Satu Rupiah) dengan program yang akan dilaksanakan sebanyak 5(lima) program.

Dari Perjanjian Kinerja tersebut ditetapkanlah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Penyusunan DPA berdasarkan Renja dan Renstra Kecamatan Sungai Serut dengan berpedoman pada RPJMD yang sudah ditetapkan. Renstra Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bengkulu Tahun 2025-2029.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam mengukur capaian indikator kinerja Kecamatan Sungai Serut Tahun 2025 didasarkan pada ketentuan yaitu :

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian target indikator kinerja adalah :

$$\text{Capaian IKU} = \text{Realisasi} / \text{Target} \times 100 \%$$

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik

Rumus tersebut akan digunakan dalam menetapkan persentase pengukuran indikator kinerja untuk persentase capaian realisasi fisik. Semakin tinggi nilai persentase capaian realisasi yang diperoleh menunjukkan capaian kinerja yang semakin baik yang pada akhirnya mendukung tercapainya sasaran, tujuan, misi dan visi Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu yang telah ditetapkan.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam evaluasi ini juga diuraikan hal-hal yang mendukung keberhasilan sekaligus hal-hal yang menghambat sehingga menimbulkan kegagalan pencapaian target. Diupayakan pula menginventarisir langkah-langkah antisipasi yang akan dilakukan sehingga kinerja pemerintah semakin baik.

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Dari Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Perangkat Daerah Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu dalam pelaksanaannya, secara umum realisasi pencapaian target kinerja belum mencapai target yang telah ditetapkan. *Capaian dari indikator kinerja sasaran* tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Kecamatan Sungai Serut Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
Meningkatnya pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	Persentase Pelayanan di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan yang Tepat waktu Nilai SAKIP	82 BB	 B	

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada Sasaran strategis Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu Tahun 2025 yaitu Meningkatnya pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan indikator sebagai berikut :

- a) Persentase Pelayanan di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan yang tepat waktu dengan target pencapaian pada perjanjian kinerja awal sebesar 82 sedangkan pencapaian realisasinya masih belum bisa di ukur dan belum bisa ditampilkan karena belum ada hasil penilaian dari Inspektorat Kota Bengkulu atas nilai LkjIP Kecamatan

Sungai Serut Tahun 2025 dan saat ini adalah periode awal Renstra 2025 - 2029

- b) Nilai SAKIP dengan target pencapaian pada perjanjian kinerja awal sebesar BB sedangkan pencapaian realisasinya hasil penilaian dari Tim Penilai Kemenpan RB atas SAKIP Pemerintah Kota Kota Bengkulu tahun 2023 senilai **B**.

Keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Sungai Serut dapat kita lihat dari *realisasi capaian kinerja program* yang dilaksanakan perangkat daerah Kecamatan Sungai Serut untuk pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Bengkulu. Terdapat 2 (dua) Sasaran/Program Pembangunan Daerah yang akan dilaksanakan oleh kecamatan dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kecamatan Sungai Serut dalam Program Pembangunan Daerah Tahun 2025

No	Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Relaisasi Capaian Kinerja Program Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja Program Tahun 2025	%
1	Program Peningkatan Pengembangan Kapasitas Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Kecamatan dan kelurahan yang berkinerja prima	100	100	100
2	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang aktif	100	100	100
		Persentase kelurahan yang menerapkan TTG	65	71,43	109,89

Dari Tabel 3.2 dapat dilihat bahwa terdapat 2(dua) sasaran/program pembangunan daerah yang dilaksanakan Kecamatan Sungai Serut yaitu Program Peningkatan Pengembangan Kapasitas Kecamatan dan Kelurahan dan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan.

Pada Program Peningkatan Pengembangan Kapasitas Kecamatan dan Kelurahan dengan indikator capaian kinerja program adalah persentase kelurahan yang berkinerja prima dengan target capaian kinerja sebesar 100% dan realisasi sebesar 100% dan persentase capaian kinerja sebesar 100%, dengan demikian dapat dikatakan bahwa capaian kinerja program Peningkatan Pengembangan Kapasitas Kecamatan dan Kelurahan sudah berhasil dan telah memenuhi target yang sudah ditetapkan.

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan dengan indikator kinerja persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang aktif mempunyai target capaian kinerja program sebesar 100% dan capaian realisasi sebesar 100 % dan persentase capaian kinerja sebesar 100%. Dengan demikian capaian kinerja program ini sesuai yang diharapkan dan dapat dikatakan berhasil.

Pada indikator capaian kinerja program yaitu persentase kelurahan yang menerapkan TTG dengan target capaian kinerja sebesar 60% dan realisasi kinerja program sebesar 71,43 % dan persentase capaian kinerja sebesar 109,89 %, sehingga dapat dikatakan bahwa Kecamatan Sungai Serut telah berhasil dalam mencapai target terhadap persentase kelurahan yang menerapkan TTG.

3.1.2. Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023 - 2026

Capaian kinerja Kecamatan Sungai Serut pada tahun 2024, tahun 2025 dan tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 3.4. Dari Tabel dapat dilihat bahwa pada tahun 2024 yang merupakan awal periode renstra tahun 2024-2026, yang menjadi indikator sasaran dari perjanjian kinerja kecamatan hanya terdapat dua indikator seperti tercantum dalam Tabel berikut.

Tabel 3.3. Capaian Kinerja Tahun 2023, 2024, 2025 dan 2026

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA 2024	CAPAIAN KINERJA				% CAPAIAN 2022
				2023	2024	2025	2026	
1	Nilai Evaluasi LKjIP Kecamatan	-	74	65,35	68,80	-	-	-
2	Nilai SAKIP	-	BB	B	B			-

Dari Tabel 3.3. sasaran perjanjian kinerja kecamatan Sungai Serut terdapat 2(dua) indikator yaitu *Nilai Evaluasi LkjIP Kecamatan dan Nilai SAKIP* masing – masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

- ***nilai evaluasi LKjIP Kecamatan***

a. Tahun 2024

Nilai evaluasi LkjIP Kecamatan dengan nilai 68,80 diperoleh dari hasil penilaian atas nilai evaluasi LkjIP Kecamatan Sungai Serut Tahun 2024 berdasarkan Surat Inspektur Kota Bengkulu Nomor 700/117.3/LHE/IPDA/2024 Tanggal 30 Juni 2025 perihal Hasil Evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Pada Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu Tahun 2024 yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bengkulu melalui Inspektorat Kota Bengkulu. Hasil penilaian kinerja 68,80 sudah menunjukkan predikat baik (B) akan

tetapi belum berhasil mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2024 dengan target penilaian 74 dengan predikat baik (B). Pencapaian kinerja ini sudah lumayan baik namun masih ada yang harus disempurnakan berkaitan keselarasan dengan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja tahun 2025. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2025 merupakan periode awal Renstra 2025-2029.

b. Tahun 2025- 2029

Capaian kinerja Kecamatan Sungai Serut tahun 2025 – 2029 belum dapat diasjikan karena periode Renstra Tahun 2025 – 2029 baru berjalan.

- **Nilai SAKIP**

a. Tahun 2023

Pencapaian Nilai SAKIP Kota Bengkulu Tahun 2023 dari Tim Kemenpan RB mendapat nilai B (Baik) dan menunjukkan bahwa peran Kecamatan Sungai Serut dapat dikatakan baik dalam menunjang pencapaian penilaian SAKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KEMENPAN RB).

b. Tahun 2024

Pencapaian Nilai SAKIP Kota Bengkulu Tahun 2024 dari Tim Kemenpan RB mendapat nilai B (Baik) dan menunjukkan bahwa peran Kecamatan Sungai Serut dapat dikatakan baik dalam menunjang pencapaian penilaian SAKIP oleh Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
(KEMENPAN RB).

3.1.3. Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Target Jangka Menengah

Tahun 2025 merupakan tahun awal periode Renstra Kecamatan Sungai Serut Tahun 2025-2029. Target yang telah ditetapkan dalam Dokumen Renstra tersebut meningkat dari tahun ke tahun, pada sasaran Meningkatnya pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan indikator kinerja Nilai Evaluasi LKjIP Kecamatan menunjukkan bahwa target kinerja pada tahun 2024 ini sebesar 74 dengan tingkat realisasi belum bisa diukur karena belum ada hasil penilaian atas penyusunan LKjIP Kecamatan Sungai Serut Tahun 2024 oleh Inspektorat Kota Bengkulu. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023, tahun 2024 dan Tahun 2025 dan 2026 dengan target jangka menengah dapat dilihat pada Tabel 3.4 di bawah ini.

Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja 2024 dengan Target Dalam Renstra 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tahun Ke-					Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025
				2022	2023	2024	2025	2026				
1	Meningkatnya kualitas pelayanan public di kecamatan	Meningkatnya Pelayanan Di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	Nilai Evaluasi LKjIP Kecamatan	73	74	80	82	85	62,05	65,35	68,80	-

Dari tabel 3.4. di atas dapat dilihat bahwa dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kecamatan Sungai Serut ditandai dengan indikator tujuan/sasaran Nilai Evaluasi LKjIP Kecamatan berdasarkan Renstra Kecamatan

Tahun 2025-2029 dengan target kinerja pada tahun 2023 sebesar 65,35, pada tahun 2024 sebesar 68,80, sedangkan untuk tahun 2025 – 2029 belum dilakukan penilaian oleh Inspektorat Kota Bengkulu.

Tahun 2024 ini merupakan tahun terakhir periode Renstra dengan target kinerja sebesar 74 dengan pencapaian realisasinya sebesar 68,80 hasil penilaian LKjIP Kecamatan Sungai Serut Tahun 2024 oleh Inspektorat Kota Bengkulu.

3.1.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi yang Dilakukan

Secara rinci, pencapaian kinerja Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu Tahun 2025, Sasaran Strategis Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu yaitu ”Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan” dijabarkan kedalam **indikator kinerja**, yaitu *Persentase Pelayanan di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan yang Tepat Waktu*.

3.1.4.1. Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama

Sasaran Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu untuk ”Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publi di Kecamatan” dijabarkan kedalam **indikator kinerja**, yaitu *Persentase Pelayanan di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan yang Tepat Waktu*.

Analisis Indikator Capaian Program

Sasaran/Program Pembangunan Daerah yang ada di Kecamatan Sungai Serut terdiri dari 2 (dua) program dengan indikator kinerja serta penyebab keberhasilan/kegagalan dan alternatif solusinya dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

dengan outcome program yaitu Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Hal ini ditandai dengan keberhasilan dari 7 (tujuh) kelurahan dalam melaksanakan tugasnya dalam melayani masyarakat. Dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat selama tahun 2025 tidak terdapat keluhan masyarakat atas kinerja kelurahan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa dapat disimpulkan pencapaian kinerja program pada persentase kelurahan yang berkinerja prima dikatakan berhasil. Keberhasilan kinerja ini juga didukung dengan sumberdaya pegawai yang ada di kelurahan dalam melakukan pelayanan dan ketersediaan fasilitas pelayanan serta dukungan anggaran dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selain itu juga keaktifan dari seluruh kelurahan dalam mengikuti kegiatan yang ada di kecamatan dan peran serta kelurahan dalam lomba baik yang dilaksanakan di kecamatan seperti lomba kelurahan maupun lomba di tingkat Kota Bengkulu. Selain itu juga diupayakan peningkatan sumber daya pegawai dalam penerapan teknologi terkait pelayanan agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal. Jumlah dan jenis pelayanan dilaksanakan mulai surat pengantar dari kelurahan sampai ke Kecamatan Sungai Serut Tahun 2022, 2023, 2024 dan 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5. Pelayanan Administrasi Umum Kecamatan Sungai Serut Tahun 2022, 2023, 2024 dan 2025

No	Jenis pelayanan	2022				2023				2024				2025			
		Tepat waktu	Tidak Tepat Waktu	Jumlah Seluruh Pelayanan	Persentase pelayanan yang tepat waktu	Tepat waktu	Tidak Tepat Waktu	Jumlah Seluruh Pelayanan	Persentase pelayanan yang tepat waktu	Tepat waktu	Tidak Tepat Waktu	Jumlah Seluruh Pelayanan	Persentase pelayanan yang tepat waktu	Tepat waktu	Tidak Tepat Waktu	Jumlah Seluruh Pelayanan	Persentase pelayanan yang tepat waktu
1	Pengantar SKCK	7	0	7	100,00	7	1	8	87,50	14	0	14	100,00	6	0	6	100,00
2	Surat Keterangan Bersih Diri (SKBD)	21	2	23	91,30	25	2	27	92,59	8	0	8	100,00	38	0	38	100,00
3	Surat Izin Penelitian	17	1	18	94,44	19	1	20	95,00	14	0	14	100,00	9	0	9	100,00
4	Surat Pengantar Izin keramaian	166	5	171	97,07	166	8	174	95,40	29	0	29	100,00	22	0	22	100,00
5	Surat rekomendasi Izin Mendirikan bangunan (IMB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Surat Pindah Masuk	39	0	39	100,00	45	0	45	25	25	0	25	100,00	70	0	70	100,00
7	Surat Pindah Keluar	161	1	162	99,38	161	1	162	99,38	71	0	71	100,00	57	0	57	100,00
8	Surat Keterangan Tanah (SKT)	0	0	0	0	0	0	0	0	86	0	86	100,00	24	0	24	100,00
9	Surat Pemindahan Penguasaan Tanah (SPPT)	145	4	149	97,31	145	3	148	97,97	23	0	23	100,00	13	0	13	100,00
10	Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)	120	2	122	98,36	125	4	129	96,89	532	0	532	100,00	492	0	492	100,00
11	Surat Dispensasi Nikah	10	0	10	100	10	0	10	100	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Surat Keterangan Waris	145	4	149	97,31	135	9	144	93,75	97	0	97	100,00	106	0	106	100,00
13	Surat Keterangan Perekaman KTP	116	3	119	97,48	120	3	123	97,56	2	0	2	100,00	0	0	0	0
	JUMLAH	947	22	969	97,73	958	32	990	96,76	901	0	901	100,00	837	0	837	100,00

Sumber data : Data Pelayanan Administrasi Umum Kecamatan Sungai Serut Tahun 2022, 2023, 2024 dan 2025

Dari tabel 3.5 diatas dapat dilihat bahwa pelayanan administrasi dari Kelurahan sampai ke Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu pada tahun 2022 jumlahnya mencapai 969 berkas dan yang memenuhi standar tepat waktu sebanyak 942 berkas atau sebesar 97,73,39 %. Sedangkan pada tahun 2023 jumlah pelayanan administrasi umum yang tepat waktu mencapai 990 berkas dari seluruh jumlah pelayanan sebanyak 958 berkas atau mencapai 96,76 %. Pada tahun 2024 jumlah pelayanan administrasi umum yang tepat waktu mencapai 901 berkas dari seluruh jumlah pelayanan sebanyak 901 berkas atau mencapai 100,00 % dan pada tahun 2025 dengan jumlah pelayanan administrasi umum yang tepat waktu mencapai 837 berkas dari seluruh jumlah pelayanan sebanyak 837 berkas atau mencapai 100,00 %. Dengan demikian pencapaian pelayanan administrasi yang tepat waktu di Kecamatan Sungai Serut pada tahun 2024 dan 2025 meningkat dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2023 lalu, Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014, komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi Persyaratan, prosedur, jangka waktu pelayanan, biaya/tarif, produk pelayanan, dan penanganan pengaduan. Jika suatu Instansi pemerintah dan lembaga lainnya mampu menerapkan standar kualitas tersebut maka sudah dapat dikatakan bahwa Instansi pemerintah dan lembaga tersebut telah memberikan kualitas pelayanan yang baik. Standar

pelayanan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 juga diterapkan di Kecamatan Sungai Serut dengan berpedoman kepada Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan pencapaian 96,76 % pada tahun 2022 ini dan menunjukkan penurunan dibanding tahun 2021 lalu sehingga dapat diinterpretasikan bahwa Kecamatan Sungai Serut telah memberikan pelayanan yang baik.

Yang merupakan faktor penghambat dalam pencapaian meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan yaitu ada beberapa pelayanan yang tidak tepat waktu disebabkan karena pada saat masyarakat membutuhkan pelayanan, Kepala Kecamatan sedang menjalankan tugas lain dan tidak berada di tempat, dan berkas tersebut merupakan berkas yang penting dan tidak dapat diwakilkan penandatanganannya.

Jumlah pelayanan yang dilaksanakan tahun 2025 terbanyak pada pelayanan surat Keterangan Tidak Mampu dan paling sedikit Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

Meskipun telah memberikan pelayanan secara maksimal dan diinterpretasikan telah memuaskan, akan tetapi pada tahun yang akan datang Kecamatan Sungai Serut akan tetap memaksimalkan lagi pelayanan kepada masyarakat dengan tetap menjaga standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi Persyaratan, prosedur, jangka waktu pelayanan, biaya/tarif, produk

pelayanan, dan penanganan pengaduan agar tetap dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada.

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Pada Indikator Capaian Kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terdapat Indikator kinerja yaitu Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat dengan tingkat keberhasilan/kegagalan dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang aktif

Target capaian kinerja program pada persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang aktif pada tahun 2025 sebesar 100 dengan realisasi capaian kinerja program sebesar 100 dengan persentase tingkat capaian kinerja program sebesar 100%. Secara umum Kecamatan Sungai Serut telah mencapai target yang telah ditetapkan sehingga dapat dikatakan berhasil. Tingkat capaian keberhasilan ditandai dengan keaktifan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang ada di kelurahan dimana masing-masing kelurahan terdapat 1 lembaga LPM yang menaungi seluruh kegiatan kemasyarakatan yang ada di kelurahan tersebut, sehingga jumlah keseluruhan LPM dalam wilayah Kecamatan Sungai Serut 7 (tujuh) kelurahan terdapat 7 (tujuh) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

Tahun 2025 ini kegiatan LPM tetap dilaksanakan meskipun dukungan anggaran tidak terealisasi sepenuhnya, akan tetapi kegiatan rutinitas, tugas dan tanggung jawab LPM tetap berjalan seperti biasa dan tetap mengikuti anjuran dari Pemerintah dalam melaksanakan kegiatan. Peran aktif LPM dalam kegiatan kemasyarakatan mulai dari musyawarah dalam melaksanakan perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, kebersihan lingkungan, yang dijalankan bersama-sama di kelurahan. Berikut dapat di lihat peran aktif Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam pembangunan di kelurahan pada tahun 2025 kegiatan yang dilaksanakan LPM rata– rata sama pada tujuh kelurahan dalam wilayah Kecamatan Sungai Serut antara lain :

- Gotong Royong kebersihan lingkungan bersama RT dan RW
- Mengkoordinir pelaksanaan Taziah di rumah warga yang mendapat musibah dalam rangka mendukung Program Kepala Daerah.
- Mengkoordinir usulan masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) kelurahan 2025

Keterlibatan LPM sangatlah berperan dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan baik pembangunan fisik maupun non fisik. Selain itu juga LPM sebagai wadah pengkoordinasian

seluruh lembaga yang ada di kelurahan seperti PKK, karang taruna, majelis taklim, lembaga keagamaan dan lembaga lainnya. Keterlibatan peran LPM dalam kegiatan PKK ditandai dengan keberhasilan PPK kelurahan sebagai ujung tombak PKK tingkat Kecamatan meraih prestasi di Tingkat Kota Bengkulu sebagai **JUARA DUA** pada Jambore TP PKK Tingkat Kota Bengkulu Tahun 2025. Jambore diadakan setiap 2 tahun sekali. Prestasi tersebut antara lain :

- Juara 2 Lomba Masak Kudapan Berbahan Baku Ubi Tahun 2025
- Juara 2 Defile dan Yel-Yel dalam rangka Jambore Kader PKK Tahun 2015
- Juara 2 lomba Pesan Berantai Tahun 2025.

Keberhasilan pencapaian kinerja program ini dengan *faktor pendukung* sebagai berikut :

- ketersediaan anggaran yang menunjang pelaksanaan kegiatan LPM yang ada di kelurahan terutama dalam kebersihan lingkungan karena terdapat dukungan anggaran setiap kelurahan untuk memfasilitasi operasional kendaraan roda tiga yang digunakan untuk kebersihan lingkungan dan operasional petugasnya, serta dukungan anggaran untuk pemeliharaan fasilitas umum yang ada.

- Sumberdaya pengurus LPM dan masyarakat yang selalu aktif dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan di kelurahan.
- Pengkoordinasian dan kerjasama yang baik antar seluruh komponen RT, RW, Perangkat Kelurahan dan masyarakat.
- Keterlibatan Seluruh unsur masyarakat dalam kegiatan LPM.
- Keterbukaan atas pelaksanaan kegiatan yang telah dijalankan.

Faktor *Penghambat keberhasilan* capaian kinerja program persentase LPM yang aktif adalah :

- Kurangnya pemahaman sebagian kecil masyarakat akan kegiatan yang dilaksanakan oleh LPM sehingga kadang-kadang terjadi pro dan kontra.
- Kurangnya kepercayaan terhadap kinerja LPM.

Untuk mengatasi hal tersebut maka diupayakan hal – hal sebagai berikut :

- Terus memberikan pengarahan dan pengertian kepada masyarakat akan pentingnya pelaksanaan kegiatan yang ada.
- Keterbukaan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan yang dilakukan.
- Selalu berkoordinasi dengan seluruh komponen masyarakat untuk menghimpun aspirasi yang ada di masyarakat.

b. Persentase Kelurahan yang menerapkan TTG

Indikator kinerja persentase kelurahan yang menerapkan Teknologi Tepat Guna (TTG) dengan target capaian kinerja program sebesar 65 dengan realisasi capaian kinerja program tahun 2025 sebesar 71,43 dan persentase capaian kinerja program sebesar 109,89 %. Dengan demikian capaian kinerja persentase kelurahan yang menerapkan TTG dikatakan sudah berhasil dan melebihi target yang sudah ditetapkan.

Keberhasilan penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) di kelurahan disesuaikan dengan aspek lingkungan dan memperhatikan penghematan sumber daya, mudah digunakan, berdampak positif bagi seluruh warga, teknologi tersebut sesuai dan cocok dengan kondisi sosial ekonomi, teknologi yang digunakan bisa memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat, serta masyarakat itu sendiri mampu mempelajari, menerapkan serta memelihara teknologi tepat guna tersebut agar dapat memberikan manfaat berkelanjutan.

Rata-rata kelurahan yang menerapkan TTG di bidang pertanian untuk mempermudah pekerjaan, efisiensi secara ekonomis dan mempersingkat waktu pengerjaannya. Penerapan TTG oleh warga masyarakat dilakukan secara swadaya oleh masyarakat dan belum ada fasilitasi dari anggaran kecamatan dan kelurahan. Sesuai

dengan kondisi wilayah kelurahan masing – masing dan TTG yang dapat diterapkan antara lain dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut.

Tabel 3.6. Fasilitas Teknologi Tepat Guna (TTG) di kelurahan Se-Kecamatan Sungai Serut

No	Kelurahan	Hidroponik	RMU	Hand Traktor	Power Trhresr	Sabit bergigi	Mesin Pompa	Pengolah Sagu Rumbia
1	Surabaya	-	1	2	2	25	2	-
2	Semarang	-	2	4	6	115	2	-
3	Tanjung Jaya	-	1	3	3	73	3	-
4	Tanjung Agung	-	-	-	-	-	-	1
5	Sukamerindu	1	-	-	1	20	3	-
6	Kampung Kelawi	-	-	-	-	-	-	-
7	Pasar Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-

Sumber Data : Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Sungai Serut Kota Bengkulu Tahun 2022

Dari Tabel 3.6 dapat dilihat bahwa terdapat 5(lima) kelurahan dalam wilayah Kecamatan Sungai Serut yang menerapkan Teknologi Tepat Guna (TTG) di bidang pertanian yaitu kelurahan Surabaya, Semarang, Tanjung Jaya, Tanjung Agung dan Sukamerindu dan hanya ada 2 (dua) kelurahan yang belum menerapkan TTG yaitu kelurahan Kampung Kelawi dan Pasar Bengkulu. Adapun jenis TTG yang diterapkan antara lain Rice Miiling Unit (RMU), Hand Traktor, penanaman sayuran Hidroponik, Power Trhresr, Sabit Bergigi, Pompa Air dan Pengolah Sagu Rumbia. Kelurahan yang Paling banyak menerapkan TTG yaitu Kelurahan Semarang karena kelurahan ini

memiliki lahan pertanian yang lebih luas dibandingkan dengan kelurahan lainnya.

Faktor Pengambat keberhasilan ini antara lain :

- Belum adanya dukungan anggaran untuk melaksanakan kegiatan baik sosialisasi maupun penerapan TTG di masyarakat.
- Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan TTG

Dari hambatan di atas, maka diupayakan hal-hal yang dapat menunjang pencapaian kinerja program persentase Kelurahan yang menerapkan TTG yaitu :

- Diupayakan dukungan anggaran di kelurahan yang dapat menunjang penerapan TTG di kelurahan
- Memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat mengenai Teknologi Tepat Guna (TTG)
- Manfaat ekonomis dari penerapan TTG sehingga masyarakat lebih efisien dalam menjalankan pekerjaannya
- Menambah Pengetahuan kepada masyarakat akan pentingnya serta manfaat penerapan TTG di masyarakat.

3.1.5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang ada dalam menjalankan pemerintahan Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu untuk mencapai keberhasilan Capaian perjanjian kinerja yang telah

ditetapkannya pada tahun 2024 ini dan untuk meningkatkan pencapaian target tahun yang akan datang, maka diupayakan untuk dapat memanfaatkan sumberdaya secara efisien untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai target perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Efisiensi yang dapat dilakukan dalam hal sebagai berikut:

1. Efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya keuangan dengan menggunakan jumlah anggaran yang ada secara baik sesuai dengan peruntukannya secara efisien untuk menghasilkan kinerja yang semaksimal mungkin. Efisiensi juga mempertimbangkan jumlah program yang dilaksanakan harus disesuaikan dengan RPJMD Pemerintah Kota Bengkulu dan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Di Kecamatan Sungai Serut telah diupayakan efisiensi penggunaan anggaran untuk mendukung pencapaian Sasaran/Program Pembangunan Daerah dalam dokumen RPJMD, bahwa Kecamatan melaksanakan Program Peningkatan Pengembangan Kapasitas Kecamatan Dan Kelurahan Dan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan dengan kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian indikator kinerja Persentase Kecamatan dan Kelurahan Yang berkinerja Prima dan, Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Yang Aktif dan Persentase Kelurahan Yang Menerapkan TTG dapat dilihat pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7. Analisis Efisiensi Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah

No	Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat efisiensi
1	Program Peningkatan Pengembangan Kapasitas Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kelurahan yang berkinerja prima	100	93,72	6,28%
2	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang aktif	100	89,76	10.24%
		Persentase Kelurahan yang Menerapkan TTG	109,89	-	-

Dari Tabel 3.7 diatas dapat dilihat bahwa efisiensi penggunaan anggaran Pada Sasaran/Program Pembangunan Daerah dalam dokumen RPJMD antara lain :

- Pada Indikator kinerja program persentase kelurahan yang berkinerja prima dapat dilihat bahwa tingkat penyerapan anggaran sebesar 93,72% dengan tingkat realisasi capaian kinerja program sebesar 100% dengan tingkat efisiensi sebesar 6,28%. Sehingga dapat dikatakan bahwa Kecamatan Sungai Serut sudah berhasil melakukan efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai sasaran/program pembangunan daerah yaitu Program Peningkatan Pengembangan Kapasitas Kecamatan dan kelurahan dengan

memanfaatkan sumber daya pegawai di kelurahan dan penghematan penggunaan sarana dan prasarana yang ada di kelurahan.

- Pada Indikator kinerja program persentase Lembaga pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang aktif dapat dilihat bahwa tingkat penyerapan anggaran sebesar 89,76% dengan tingkat realisasi capaian kinerja program sebesar 100% dan tingkat efisiensi sebesar 10,24%. Sehingga dapat dikatakan bahwa Kecamatan Sungai Serut sudah berhasil melakukan efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai sasaran/program pembangunan daerah yaitu Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan dengan mengoptimalkan peran aktif LPM dan masyarakat di kelurahan dan penghematan penggunaan sarana dan prasarana LPM yang ada.
- Pada Indikator kinerja program persentase kelurahan yang menerapkan TTG dapat dilihat bahwa Tahun 2023 ini tidak ada dukungan anggaran untuk mencapai indikator program ini, akan tetapi Kecamatan Sungai Serut telah mampu mencapai target yang ditetapkan sebesar 60 dengan persentase capaian kinerja program sebesar 119,03 % sehingga dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Sungai Serut telah mampu melakukan efisiensi pada indikator kinerja ini, walaupun tanpa dukungan anggaran telah mampu mencapai target yang sudah ditetapkan dengan melakukan efisiensi penerapan TTG secara swadaya oleh masyarakat.

3.1.6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

1.1.6.1. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja program Persentase Kelurahan yang berkinerja prima

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi kelurahan untuk mencapai kinerja ini, kelurahan sebagai ujung tombak pelaksanaan ditunjang dengan **program** sebagai berikut :

- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Sedangkan **kegiatan** yang dilaksanakan adalah:

- Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kampung Kelawi) yang meliputi penyediaan operasional RT,RW,Adat, Perangkat Kelurahan Linmas, operasional administrasi secara umum di kelurahan serta kelengkapan fasilitas penunjang pelayanan.
- Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Semarang) yang meliputi penyediaan operasional RT,RW,Adat, Perangkat Kelurahan Linmas, operasional administrasi secara umum di kelurahan serta kelengkapan fasilitas penunjang pelayanan.

- Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tanjung Agung) yang meliputi penyediaan operasional RT,RW,Adat, Perangkat Kelurahan Linmas, operasional administrasi secara umum di kelurahan serta kelengkapan fasilitas penunjang pelayanan.
- Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tanjung Jaya) yang meliputi penyediaan operasional RT,RW,Adat, Perangkat Kelurahan Linmas, operasional administrasi secara umum di kelurahan serta kelengkapan fasilitas penunjang pelayanan.
- Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Surabaya) yang meliputi penyediaan operasional RT,RW,Adat, Perangkat Kelurahan Linmas, operasional administrasi secara umum di kelurahan serta kelengkapan fasilitas penunjang pelayanan.
- Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pasar Bengkulu) yang meliputi penyediaan operasional

RT,RW,Adat, Perangkat Kelurahan Linmas, operasional administrasi secara umum di kelurahan serta kelengkapan fasilitas penunjang pelayanan.

- Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Sukamerindu) yang meliputi penyediaan operasional RT,RW,Adat, Perangkat Kelurahan Linmas, operasional administrasi secara umum di kelurahan serta kelengkapan fasilitas penunjang pelayanan.

1.1.6.2. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja program Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang aktif

Program yang menunjang pencapaian kinerja ini adalah **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan** dengan **kegiatan** sebagai berikut:

- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (kelurahan Surabaya)
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (kelurahan Semarang)

- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (kelurahan Tanjung Jaya)
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (kelurahan Tanjung Agung)
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (kelurahan Sukamerindu)
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (kelurahan Kampung Kelawi)
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (kelurahan Pasar Bengkulu)

LPM yang ada di tujuh kelurahan tetap menjalankan tugas semaksimal mungkin walaupun tidak di dukung dengan anggaran yang memadai. Adapun kegiatan yang sudah

dilaksanakan LPM selama tahun 2024 ini rata – rata sama disetiap kelurahan antara lain :

- Gotong Royong kebersihan lingkungan bersama RT dan RW
- Mengkoordinir pelaksanaan Taziah di rumah warga yang mendapat musibah dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
- Di LPM Kelurahan Sukamerindu mengajukan legalitas kepemilikan tanah untuk pemakaman umum TPU Sukamerindu yang terletak di Kelurahan Surabaya, dan proses tersebut masih menunggu sertifikat tanah belum terbit dari BPN.

3.2. REALISASI ANGGARAN

Jumlah Angggaran Pada Tahun Anggaran 2025 Kecamatan Sungai Serut seperti terlihat pada Tabel 3.8, dimana Kecamatan Sungai Serut mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.150.718.301,- dan setelah Perubahan Anggaran menjadi Rp. 11.372.742.788,- dengan alokasi Belanja Operasi sebesar Rp. 10.030.132.788,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 1.342.610.000,- dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 9.201.087.862,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 1.173.986.558,- dengan total realisasi keseluruhan sebesar Rp. 10.375.074.420,-atau sebesar 91,22 %.

Tabel 3.8. Realisasi penggunaan anggaran Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu Tahun 2025

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Keuangan(%)	Persentase Fisik (%)
1	Belanja Operasi	10.030.132.788	9.201.087.862	91,73%	100,00%
2	Belanja Modal	1.342.610.000	1.173.986.558	87,44%	100,00%
JUMLAH		11.372.742.788	10.375.074.420	91,22%	100,00%

Dari Total anggaran yang ada, yang diperuntukkan untuk mendukung pencapaian kinerja dapat dilihat pada Tabel 3.9 berikut.

Tabel 3.9. Pengukuran Program/Kegiatan yang mendukung Pencapaian Kinerja Tahun 2025

Sasaran strategis	Indikator Sasaran	Tar get	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Program Peningkatan Pengembangan Kapasitas Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kelurahan yang berkinerja prima	100 %	Program Peyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	- Peningkatan efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kampung Kelawi)	Rp 217.257.820	Rp 214.316.933	98,64 %
				- Peningkatan efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Semarang)	Rp 194.945.307	Rp 185.897.500	96,35 %
				- Peningkatan efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tanjung Agung)	Rp 134.121.044	Rp 131.513.128	98,05 %
				- Peningkatan efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Tanjung Jaya)	Rp 146.971.375	Rp 144.757.659	98,49 %

				- Peningkatan efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Surabaya)	Rp 392.501.610	Rp 368.937.479	93,99 %
				- Peningkatan efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pasar Bengkulu)	Rp 178.460.425	Rp 161.414.972	90,44 %
				- Peningkatan efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Sukamerindu)	Rp 295.124.250	Rp 271.910.094	92,13 %
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang aktif	100 %	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	- Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kelurahan Kampung Kelawi)	Rp 20.066.000	Rp 14.066.000	70,09 %
				- Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kelurahan Semarang)	Rp 13.950.000	Rp 13.900.000	99,64 %
				- Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kelurahan Tanjung Agung)	Rp 19.818.000	Rp 19.818.000	100,00 %
				- Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kelurahan Tanjung Jaya)	Rp 20.823.500	Rp 18.047.500	86,66 %

				- Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kelurahan Surabaya)	Rp 18.078.500	Rp 17.705.000	97,93 %
				- Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kelurahan Pasar Bengkulu)	Rp 16.111.000	Rp 15.805.000	98,10 %
				- Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kelurahan Sukamerindu)	Rp 12.012.500	Rp 0,00	0,00 %
	Persentase kelurahan yang menerapkan TTG	65%	-	-	-	-	-

Dari tabel 3.9 di atas dapat dilihat bahwa untuk mencapai target persentase kelurahan yang berkinerja prima dilaksanakan 7(tujuh) sub kegiatan dan dalam mencapai persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang aktif dilaksanakan 7(tujuh) sub kegiatan sedangkan untuk mencapai persentase kelurahan yang menerapkan TTG belum ada kegiatan yang dilaksanakan. Pengukuran keberhasilan Program/Kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Program/kegiatan yang realisasinya mencapai 70% keatas antara lain:

- Sasaran Strategis Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terdapat 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan yang pencapaian realisasinya tertinggi di atas 98,94 % sebagai berikut :

- a) kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan

- Sub kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Kampung Kelawi) dengan realisasi penyerapan anggaran mencapai 98,94%.
- Sub kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kelurahan Pasar Bengkulu) dengan realisasi penyerapan anggaran mencapai 98,10%.

- Sasaran Strategis Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan hanya terdapat 1 (satu) Kelurahan yang kegiatan dan sub kegiatan yang pencapaian realisasinya mencapai 100% yaitu Kelurahan Tanjung Agung.

B. Program/kegiatan yang tidak didukung dengan anggaran yaitu Program/kegiatan untuk mencapai Sasaran Strategis Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan

Program/kegiatan Untuk mencapai Sasaran Strategis Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan yang tidak didukung dengan anggaran terdapat *satu indikator sasaran* yaitu *persentase kelurahan yang menerapkan TTG* dengan realisasi anggaran sebesar 0% karena pada program ini belum didukung dengan anggaran karena anggaran yang ada masih di prioritaskan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Secara Umum pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam menunjang capaian kinerja program sudah baik ditandai dengan tingkat realisasi anggaran dari masing – masing kegiatan mencapai di atas 90%. Dan dapat dikategorikan penyerapan realisasinya baik karena masih diatas 90%.

Pada kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan terdapat sub kegiatan yang pencapaian penyerapan anggarannya mencapai 100% yaitu Kelurahan Tanjung Agung. Meskipun terdapat penyerapan anggaran 0% yaitu Pada Kelurahan Sukamerindu hal ini disebabkan karena LPM tidak aktif, LPM kelurahan masih dapat melaksanakan kegiatannya secara swadaya oleh masyarakat.

BAB IV

P E N U T U P

Dengan selesainya penyusunan LKjIP tahun 2025 Kantor Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu yang merupakan salah satu sarana untuk mencapai penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN telah terpenuhi, Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Kecamatan Sungai Serut merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2025 yang disusun untuk menindak lanjuti Instruksi Presiden RI Nomor : 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini dapat juga digunakan sebagai media peningkatan kinerja serta sebagai umpan balik dalam pengambilan keputusan pihak-pihak terkait terutama digunakan oleh segenap jajaran pimpinan dan staf Kantor Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu Tahun 2025 ini, maka diharapkan dapat memberikan gambaran capaian kinerja target yang telah ditetapkan. Hasil Capaian Kinerja Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu Tahun 2025 adalah :

1. Capaian sasaran strategis Kecamatan Sungai Serut ditetapkan dengan indikator nilai evaluasi LkjiP Kecamatan dengan nilai capaian kinerja belum terukur dan belum bisa ditampilkan karena hasil penilaian Pemerintah Kota Bengkulu melalui Inspektorat Kota Bengkulu belum bisa memberikan penilaian dan saat ini masih dalam tahap penyusunan LKjIP tahun 2024 sehingga hasilnya belum dapat disajikan.

2. Capaian Indikator Kinerja dari Sasaran Strategis Nilai SAKIP sebesar BB pada tahun 2025 ini dari hasil penilaian atas Penyusunan SAKIP Pemerintah Kota Bengkulu dari Tim Penilai kementerian RB sebesar B menunjukkan Kecamatan Sungai Serut telah berhasil memberikan kontribusinya pada pencapaian kinerja Pemerintah Kota Bengkulu.
3. Jika dilihat dari capaian kinerja program yang termuat dalam Sasaran Program Pembangunan Daerah, Kecamatan Sungai Serut melaksanakan Program Peningkatan Kapasitas Kecamatan dan Kelurahan dan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Indikator dari capaian Program Peningkatan Kapasitas Kecamatan dan kelurahan adalah Persentase Kelurahan yang berkinerja prima dengan target sebesar 100 dan realisasi capaian kinerja sebesar 100 dengan persentase capaian kinerja Program sebesar 100 % dan dapat dikatakan bahwa Kecamatan Sungai Serut telah berhasil.
 - b. Indikator dari capaian Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan terdapat 2 (dua) indikator yaitu :
 - Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang aktif dengan target capaian sebesar 100, capaian kinerja program tahun 2025 sebesar 100 dan persentase capaian kinerja program sebesar 100% dan dapat disimpulkan Kecamatan Sungai Serut telah berhasil.
 - Persentase Kelurahan yang menerapkan TTG dengan target sebesar 65 dan realisasi capaian program sebesar 71,43 dengan persentase capaian

kinerja program sebesar 109,89%. Dengan demikian dari capaian kinerja ini Kecamatan Sungai Serut dikatakan berhasil.

Pada Indikator Sasaran Persentase Kelurahan yang menerapkan TTG juga masih dapat dicapai walaupun belum didukung dengan anggaran dari kecamatan maupun kelurahan dan dilakukan secara swadaya oleh masyarakat.

Untuk memaksimalkan kinerja Kecamatan Sungai Serut sesuai dengan yang telah ditetapkan maka diupayakan di masa yang akan datang untuk mengalokasikan anggaran guna memfasilitasi penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) di kelurahan baik untuk penerapannya secara langsung maupun untuk kegiatan sosialisasi pengenalan TTG kepada masyarakat. Selain itu juga mengefisienkan penggunaan anggaran yang ada, memaksimalkan penggunaan sumber daya, baik sumber daya pegawai maupun sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan kepada masyarakat agar seluruh kegiatan yang dilaksanakan dapat menunjang pencapaian kinerja kecamatan secara keseluruhan.

Bengkulu, Maret 2026

KEPALA KECAMATAN SUNGAI SERUT

ABRIADI, SH
Pembina Tk. I
NIP. 196810051997031009